

Polisi Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Panwaslu

■ Eko Widiyatno

CILACAP — Unit Tipikor Satreskrim Polres Cilacap melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi Panwaslu Kabupaten Cilacap ke Kejaksaan Negeri Cilacap. Berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cilacap pada 10-12 Maret lalu.

Menurut Kapolres Cilacap, AKBP Ulung Sampurna Jaya, berkas itu bahkan sudah dinyatakan lengkap atau P 21.

“Dengan pelimpahan ini, proses selanjutnya hanya tinggal dilakukan pemberkasan oleh penyidik di kejaksaan, untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cilacap hingga disidangkan,” ujarnya, Senin (23/3).

Disebutkan, penyelidikan kasus ini dilakukan aparatnya berdasarkan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Panwaslu Cilacap terhadap dana hibah dari Pemkab Cilacap pada 2012. Dari penyelidikan, dite-

mukan sejumlah bukti yang cukup kuat sehingga status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Saat itu, Panwaslu Cilacap yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilukada menerima dana hibah sebanyak dua kali. Hibah pertama diterima pada 29 Februari 2012 dengan nominal Rp 812.749.000. Sedangkan dana hibah kedua diterima pada pertengahan Maret 2012, dengan nominal Rp 2.252.079.900,” jelasnya.

Dalam penggunaannya, papar dia, penyidik menemukan adanya kejanggalan karena tidak sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB). Bahkan dalam pengelolaannya, dana hibah tersebut ternyata tidak dipegang dan dikelola bendahara Panwaslu.

“Atas perintah ketua Panwaslu saat itu, dana hibah dipegang dan dikelola tersangka ASW, selaku kepala Sekretariat Panwaslu dengan dibantu dua stafnya, Ninik Istriani dan Imam Supardi,” jelas Kapolres.

Mengenai penyimpangan penggunaan dana hibah, menurut Kapolres, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK. Dari hasil audit tersebut, diketahui kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp 330.043.491

“Dugaan terjadi penyimpangan, karena penggunaan dana tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap, tidak sesuai bukti fisik di lapangan,

keterangan adanya pengalihan tugas bendahara Panwaslu, pemotongan anggaran Panwascam Kabupaten Cilacap, dan adanya mark up barang yang dibeli,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, ujar Kapolres, polisi menetapkan empat orang menjadi tersangka. Mereka terdiri dari SA (39) yang saat itu menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Cilacap, dan tiga staf sekretariat Panwaslu dari kalangan PNS.

■ ed: yusuf assidiq